GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Republika **Tgl/Bln/Thn : 21 November 2007**

Subyek : Sampah **Hari : Rabu**

Halaman : 11

DKI Janji Tuntaskan Masalah TPA Bantargebang

Pembentukan badan usaha bersama pengelolaan sampah masih dibahas.

BEKASI -- Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo menjanjikan segera menuntaskan kewajiban terkait permasalahan di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah Bantargebang, pekan ini.

"Saya memahami memang ada beberapa hal yang belum dilakukan dan itu akan kita selesaikan dalam minggu ini," kata Fauzi usai bertemu dengan Wali Kota Bekasi, Akhmad Zurfaih, Selasa (20/11).

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Akhmad Zurfaih mengirimkan surat tentang evaluasi pengelolaan TPA Bantargebang pada Gubernur DKI Jakarta. Dalam surat itu Pemkot Bekasi menilai ada 19 kegiatan yang belum dilaksanakan Pemprov DKI. Antara lain pengoperasian instalasi pengolahan air sampah dan saluran, pemasangan pipa ventilasi gas dan pengurangan ketinggian sampah.

Termasuk dalam kewajiban yang belum dilakukan adalah pembebasan lahan seluas 2,3 hektare di kawasan itu untuk perluasan TPA. "Ada penyelesaian pembayaran yang harus dibayar oleh Pemprov DKI dan ada pembebasan tanah di dalam, itu akan kita selesaikan, keterlambatan itu terjadi karena baru dapat pengesahan APBD Perubahan 2007 dari Mendagri Senin (19/11) lalu," terang Fauzi Bowo.

Sementara itu, terkait proses pembentukan badan usaha bersama antara Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi untuk pengelolaan TPA Bantargebang, Fauzi menyatakan hal tersebut tengah dalam proses. "Pembentukan badan usaha bersama itu masih dalam proses penyelesaian, proses tender yang masih harus diselesaikan dan ini terus berjalan," paparnya.

Untuk permintaan kenaikan biaya pengangkutan sampah di TPA Bantargerbang, dari semula Rp 62.500 per ton menjadi Rp 110 ribu, Fauzi menyatakan masih dipertimbangkan. "Kita akan sesuaikan dengan kemampuan, kita akan nilai kembali dan analisis, akan ada kesepakatan kemampuan kita di bawah Rp 110 ribu," ujar gubernur.

Sebelumnya, terkatungnya masalah pengelolaan sampah di TPA Bantargebang sempat membuat berang DPRD Kota Bekasi. Bahkan dewan di kota ini mendesak Pemkot Bekasi untuk menutup TPA tersebut. Pasalnya, di mata dewan, status keberadaan TPA tersebut tidak jelas menyusul berakhirnya kerja sama bipatrit antarkedua daerah tersebut.

Sikap itu disampaikan kepada pihak eksekutif setelah dewan membentuk panitia khusus membahas masalah tersebut. "Kita telah evaluasi perjanjian bipartit antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI, dan ternyata isi perjanjian bipartit banyak yang tidak sesuai dengan keputusan DPRD," kata Rachmat, belum lama ini.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam perjanjian bipartit, sebut Rachmat, terutama pada Pasal 7 tercantum bahwa apabila sampai dengan 14 juli 2007 Badan Usaha Bersama tidak terbentuk, maka TPA Bantargebang harus tutup. Akibatnya hingga sekarang dana untuk program *community development* sebesar 20 persen tidak jelas. Selain itu, secara prosedural, pengoperasian TPA tersebut telah berakhir. Untuk itu harus ditutup.

Rachmat mengungkapkan, pengoperasian TPA Bantargebang dalam enam bulan terakhir tidak ada sesuatu yang dihasilkan bagi Pemkot Bekasi. Khususnya dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena sampai saat ini Pemprov DKI Jakarta belum bayar uang kompensasi yang totalnya sekitar Rp 6,4 miliar. "Yakni dari Mei 2007 hingga bulan ini."

Senada diungkapkan Ketua Pansus 26 DPRD Kota Bekasi, Wahyu Prihantono. Menurut Wahyu sebetulnya untuk masalah TPA Bantargebang ini, Pemkot Bekasi sudah diingatkan berkali-kali. "Ada apa ini dengan eksekutif, ketika ada sesuatu yang dilanggar tetapi mereka diam saja."

Sekdakot Bekasi, Tjandra Utama lebih memilih untuk melakukan musyawarah dengan Pemprov DKI. "Ini harus dibicarakan baik-baik, bukan masalah tutup buka."

Fakta Angka
2,3 Hektare
Lahan di sekitar TPA Bantargebang yang akan dibebaskan Pemprov DKI Jakarta.

Bekasi Bangun Tandon Air

BEKASI -- Untuk meminimalisasi terjadinya banjir, Pemkot Bekasi berencana membuat tandon air seluas lima hektare di wilayah Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Wali Kota Bekasi, Akhmad Zurfaih menyatakan, proyek ini sudah dimasukkan dalam rencana APBD 2008. "Untuk biaya pembebasan lahannya kira-kira Rp 20 miliar," kata Zurfaih, Selasa (20/11).

Untuk proyek ini, kata Zurfaih, sejumlah pemerintah daerah di sekitar wilayah Kota Bekasi ikut terlibat. Yakni, Pemkot Depok, Pemkot Bogor, Pemkab Bogor, serta Pemkab Cianjur. Namun Zurfaih tidak mengungkapkan secara rinci mengenai keterlibatan pemerintah daerah lainnya dalam proyek tersebut.

Diakui Zurfaih, tandon air tersebut memang tidak akan mampu mencegah banjir. Tetapi paling tidak bisa menampung sementara air kiriman dari wilayah Bogor. Lebih dari itu, ke depannya tandon air tersebut bisa juga digunakan untuk irigasi pertanian. Sementara itu, mengenai kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Selasa (20/11) kemarin, menurut Zurfaih hanya sebatas silaturahmi.

Namun, kata dia saat bertemu Foke, panggilan Fauzi Bowo, sempat juga disinggung mengenai masalah penanganan banjir. Pemkot Bekasi, katanya, telah melakukan normalisasi sejumlah sungai. Di antaranya Kali Blencong, Kali Cakung, Kali Sunter, dan Kali Bojong Rangkong. Keempat kali ini akan dialirkan ke Banjir Kanal Timur (BKT) yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan. Namun tetap saja, kata Zurfaih, jika BKT belum rampung, maka air dari keempat sungai ini tetap akan menggenangi wilayah Jakarta, khususnya kawasan Tanjung Priok.

Sementara itu, Pemprov DKI berjanji akan mempercepat pembangunan proyek BKT sepanjang 23,6 kilometer yang membelah kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Menurut Foke, proyek BKT hingga pertengahan November 2007 ini baru rampung sekitar 40-50 persen dari total keseluruhan proyek. "Pada akhir tahun 2007 nanti, kita menargetkan 72 persen," kata Foke, usai bertemu Wali Kota Bekasi.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP